



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

PELINDUNGAN KELOMPOK RENTAN DALAM SITUASI KEBENCANAAN

Mohammad Teja
Analisis Legislatif Ahli Muda
teja@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Tantangan Indonesia dalam menghadapi peningkatan frekwensi bencana akibat perubahan iklim jika tidak diantisipasi dengan baik akan menjadi persoalan yang akan dihadapi pada tahun-tahun mendatang. Apalagi ketidakmenentuan perubahan iklimakhir-akhir ini yang diikuti dengan bencana geologi, dampaknya dapat dipastikan akan mengganggu gerak pembangunan. Menurut Badan Meteorologi, Klmatologi, dan Geofisika (BMKG) puncak musim hujan berada pada bulan Januari 2023, dan sebanyak 72 persen wilayah di Indonesia akan menerima curah hujan sedan, sedangkan sisanya akan mengalami curah hujan tinggi. Sedangkan setelah bergesernya *La Nina*, akan ada resiko kebakaran hutan yang meningkat sehingga harus diwaspadai pada musin kemarau tahun mendatang. Selain itu , tantangan bencana yang bersumber dari kondisi wilayah Indonesia yang berada dalam zona tumbukan lempengan yang sangat aktif membuat kita rentan terhadap gerakan bumi.

Korban bencana akibat cuaca ekstrem dan geologi tentunya dapat diantisipasi dengan penanganan pengurangan munculnya resiko baru. Kelompok rentan misalnya memiliki resiko yang paling tinggi terhadap kejadian kebencanaan. Untuk kejadian bencana Cianjur, data pengungsi hingga 1 Desember 2022 dari 492 titik dengan rincian 372 titik terpusat dari 120 titik pengungsi mandiri. Jumlah total pengungsi yang di survei sebanyak 114.414 jiwa, terdiri dari 54.659 laki-laki dan 59.755 jiwa perempuan, dari semua pengungsi yang terdata terdapat 146 penyandang disabilitas, ibu hamil 380 jiwa, dan lansia sebanyak 7.309 jiwa. Kaum difabel contohnya, dalam keadaan bencana mendapat beban tambahan lebih besar, dibutuhkan perhatian khusus agar kesetaraan bagi yang selamat dalam menjalani hidup meskipun dalam kondisi di tenda darurat. Kondisi darurat lainnya dialami oleh ibu hamil pasca kejadian bencana, dalam data yang berbeda, dilaporkan setidaknya ada sekitar 1.400 ibu hamil saat kejadian gempa Cianjur, banyak dari mereka mengalami trauma dan beresiko anak-anak yang dilahirkan stunting akibat korban gempa tersebut. Untungnya tidak jauh dari lokasi sudah didirikan tenda Layanan Kesehatan Reproduksi oleh kementerian Kesehatan bersama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat dengan luas 100 meter persegi dilengkapi dengan lima petugas Kesehatan yang dilengkapi alat medis untuk ibu dan anak.

Selain puluhan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan pada layanan tersebut, disana juga dapat dijumpai pelayanan terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak hingga kesehatan lansia. Pelindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 huruf e UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan yang berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial. Kelompok yang dimaksud rentan didalamnya termasuk; bayi, balita anak-anak, ibu yang sedang mengandung atau menyusui, penyandang disabilitas dan orang lanjut usia.

Mereka semua mendapatkan prioritas dalam penanggulangan bencana, bisa saja mereka terlewat untuk mendapatkan bantuan dari kementerian terkait. Untuk itu, diperlukan ketersediaan data *update* yang di perbaharui secara berkala dan berkesinambungan guna ketersediaan data awal pada daerah-daerah yang memiliki potensi besar kerawanan bencana. Hal ini akan memudahkan tindakan situasi keadaan darurat dan pemulihan pasca bencana. Selain itu, kelompok-kelompok rentan ini juga dapat diidentifikasi melalui serangkaian pencegahan bencana yang dilakukan guna meminimalisasi ancaman bencana terhadap masyarakat itu sendiri. Untuk itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara bersama membangun data (pusat data) potensi resiko ancaman bencana pada setiap wilayah rawan bencana guna mengatasi dampak buruk yang ditimbulkan karena bencana.

Atensi DPR

Melalui fungsi pengawasan, Komisi VIII DPR RI dapat melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk meminta penjelasan mengenai sejauhmana peningkatan kewaspadaan dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi besar bencana kedepan melalui peran BNPB. Rapat Kerja dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dapat dilakukan untuk menerangkan upaya yang telah dilakukan Kemensos dan Kementerian PPPA dalam menangani kelompok rentan di daerah bencana serta kendala yang dialami di lapangan saat memberikan bantuan. Ketersediaan data tentang informasi semua kelompok rentan pada daerah yang memiliki potensi bencana apakah memadai dan *up to date*. Bagaimana koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah mengenai ketersediaan data dan pembaharuannya khususnya potensi kelompok rentan korban bencana.

Sumber

Kompas, 2, 3, dan 4 Desember 2022;
Media Indonesia, 1, dan 4 Desember 2022;;
nasional.tempco.co, 1 Desember 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Ekkuinbang
Mandala Harefa
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Monika Suhayati
Venti Eka Satya

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022